



PENGUKURAN PENGUNGKAPAN *SUSTAINABILITY REPORTING* HIMPUNAN BANK NEGARA (HIMBARA)

Ahmad Fajri¹, Azmi Kurnia Izzati², Agus Munandar³

^{1,2,3}Universitas Esa Unggul

¹ahmad.fajri@esaunggul.ac.id, ²azmikurniaizzati@gmail.com, ³agusmunandar@esaunggul.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 20 Desember 2021

Disetujui : 3 Januari 2022

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
GRI Standards,
Himbara,
Sustainability
Report

Sustainability Report (SR) dipandang sebagai salah satu bentuk komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai kinerja sosial agar dapat diukur, dibandingkan dan dinilai oleh para pemangku kepentingan. Dalam penyusunannya, salah satu pedoman yang digunakan disebut GRI Standards yang sekaligus menjadi tolok ukur jumlah pengungkapan yang sebaiknya disajikan dalam SR perusahaan. Objek penelitian ini adalah SR periode 2018-2020 milik bank-bank yang tergabung dalam Himbara yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN yang dianalisis dengan menggunakan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bank-bank tersebut kuat dalam pengungkapan umum kategori profil organisasi, strategi, etika dan integritas, keterlibatan pemangku kepentingan serta praktik pelaporan namun masih memerlukan peningkatan yang cukup banyak pada kategori tata kelola, ekonomi, lingkungan dan sosial.

ABSTRACT

Keywords:
GRI Standards,
Himbara,
Sustainability
Report

The Sustainability Report is seen as a form of communication between companies and stakeholders to provide an overview of various social performances so that stakeholders can measure, compare and evaluate them. In its preparation, one of the guidelines used is called the GRI Standards which is also a benchmark for the amount of disclosure that should be presented in the SR. The object of this research is the SR for 2018-2020 belonging to the banks that are members of the Himbara, namely Bank Mandiri, BNI, BRI and BTN which are analyzed using content analysis. The results of the study show that these banks are strong in general disclosure such as of organizational profile, strategy, ethics and integrity, stakeholder engagement and reporting practices but still require considerable improvement in the categories of governance, economics, environment and social.

PENDAHULUAN

Perbankan sebagai salah satu *controversial industry*, menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report/SR*) untuk menghindari terjadinya asimetri informasi dan menunjukkan komitmen manajemen terhadap 'keberpihakan' perusahaan terhadap masyarakat (Sardanelli et al., 2021). Sebagaimana diketahui, dalam *controversial industries*, para pemangku kepentingan cenderung skeptis terhadap tingkat keberlanjutan perusahaan akibat keterlibatan praktik maupun produk yang

berbahaya maupun memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan amoral. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya SR bagi dunia perbankan dimana setiap aspek yang diungkapkan dalam SR merupakan informasi yang disajikan dengan tujuan untuk menarik minat para pemangku kepentingan (Lane & Devin, 2017). Ditambah dengan krisis pada tahun 2008 yang menempatkan industri perbankan senantiasa ‘dalam pengawasan’ publik, industri perbankan dituntut untuk melakukan intensifikasi proses bisnisnya dalam rangka meminimalisasi efek negatif yang mungkin timbul akibat krisis tersebut dengan menerapkan strategi berbasis CSR untuk mengembalikan kepercayaan para pemangku kepentingan (Nájera-Sánchez, 2020).

Perbedaan status antara bank swasta dengan bank pemerintah menyebabkan adanya perbedaan penerapan CSR (Salsabila, 2021). Penerapan CSR pada bank swasta diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 sedangkan bank pemerintah mempedomani Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/04/2020 Tahun 2020. SR disusun oleh BUMN sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dalam tiga aspek utama yakni aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sosial. Rakhmawati & Syafruddi (2011) menyatakan bahwa pengungkapan kinerja sosial BUMN lebih luas akibat persentase kepemilikan sahamnya berada di tangan pemerintah (Dalina, 2015). Dengan kata lain, SR merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pemangku kepentingan, dalam hal ini rakyat Indonesia.

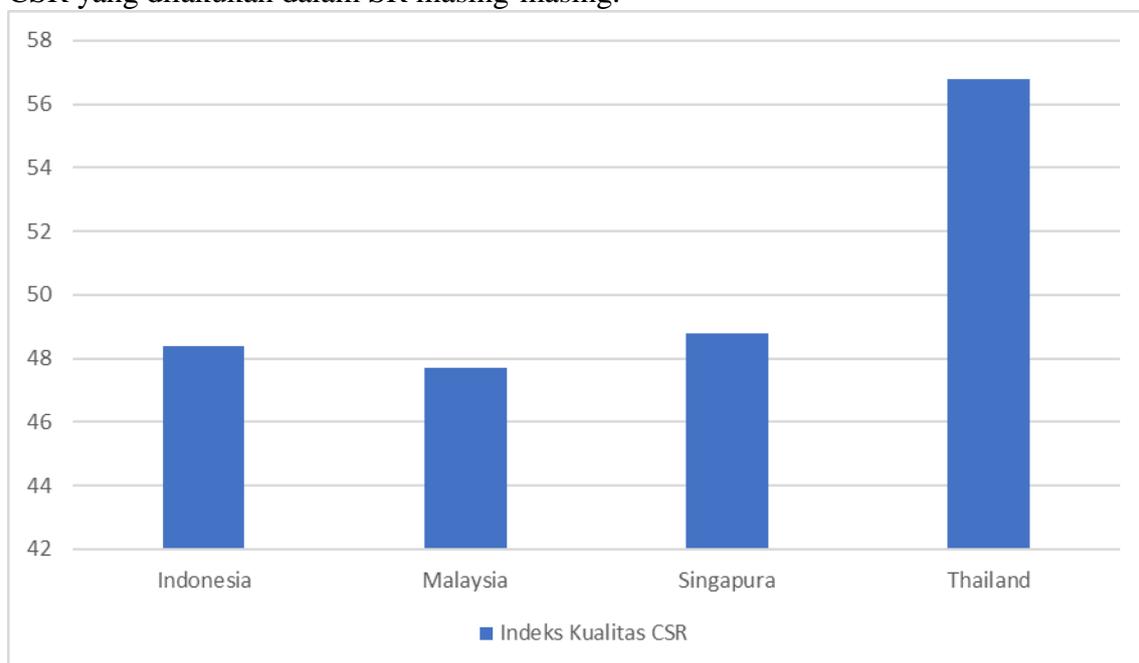
Dalam penyusunan SR, terdapat pedoman yang disusun dengan tujuan agar SR mampu memberikan gambaran utuh mengenai kinerja sosial perusahaan sehingga dapat diukur, dibandingkan maupun dinilai oleh pemilik kepentingan (Ningsih & Cheisviyanny, 2019). Salah satu pedoman yang banyak digunakan adalah standar yang disusun oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) yang merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pedoman pelaporan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial yang berlaku dalam lingkup global. GRI mulai menginisiasi panduan SR pada tahun 2000 yang selanjutnya pedoman tersebut direvisi dengan nama dan kodifikasi yang spesifik secara berkala. Pada tahun 2002, GRI menerbitkan GRI G2 disusul GRI G3, GRI G3.1 dan GRI 4 berturut-turut pada tahun 2006, tahun 2011 dan tahun 2013. Tahun 2017, GRI meluncurkan *GRI Standards* yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2018 (Pusaka, 2017).

Sejalan dengan Gambar 1, berbagai penelitian menunjukkan persentase pengungkapan kegiatan CSR berbagai perusahaan di Indonesia masih tergolong rendah (Dewi, 2013; Fauziah et al., 2016; Rindiyawati & Arifin, 2019; Suastha, 2016; Trisnawati, 2012). Padahal pengungkapan tersebut dianggap sebagai salah satu cara perusahaan mempertanggungjawabkan kegiatan sosialnya kepada masyarakat. Teori Legitimasi memandang hal ini sebagai bentuk komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat yang menjadi salah satu faktor strategis yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan (Salsabila, 2021). Selain itu pelaporan keberlanjutan perusahaan juga biasanya dilandasi oleh Teori *Stakeholder* dengan anggapan bahwa pada dasarnya perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah dan masyarakat selaku pemangku kepentingan yang membentuk suatu kontrak sosial (Syahputra et al., 2019). Kecukupan pengungkapan dalam SR akan berpengaruh pada citra perusahaan dalam pandangan pemangku kepentingan yang pada akhirnya dapat meminimalisasi friksi yang dapat terjadi apaagi jika perusahaan menggunakan sumber daya yang dianggap vital bagi masyarakat sekitar.

Penelitian mengenai kecukupan pengungkapan SR telah banyak dilakukan. Dalina (2015) melakukan penelitian tersebut terhadap SR Tahun 2013 dari BUMN berbagai

sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan hasil persentase pengungkapan tertinggi pada sektor energi sebesar 69,2% dan terendah pada sektor industri sebesar 28,8%. Ningsih & Cheisviyanny (2019) menganalisis pengungkapan SR Tahun 2017 dan 2018 pada PT Bukit Asam Tbk berdasarkan GRI G4 dan PROPER. Hasil analisis menunjukkan persentase pengungkapan tahun 2017 sebesar 69% dan tahun 2018 sebesar 53%. Sedangkan keluasan dan kedalaman SR berdasarkan PROPER berada pada kategori *State of The Art* pada tahun 2017 dan *Traiblazers* pada tahun 2018. Perbandingan pengungkapan pada SR Tahun 2016 dan 2017 milik PT Bukit Asam Tbk dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk dilakukan oleh (Syahputra et al., 2019) dengan jumlah pengungkapan PT Bukit Asam Tbk yang lebih tinggi namun keluasan dan kedalaman SR PT Indo Tambangraya Megah Tbk lebih baik. Studi komparasi pengungkapan CSR pada sektor perbankan di Indonesia sebelumnya dilakukan oleh Salsabila (2021) dengan mengambil sampel 5 bank pemerintah dan 15 bank swasta. Hasil penelitian menunjukkan pengungkapan indikator ekonomi dan lingkungan bank pemerintah lebih tinggi, sedangkan pengungkapan indikator sosial bank swasta lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengungkapan kegiatan CSR pada bank pemerintah yang dikenal dengan istilah Himbara. Penelitian ini menganalisis pengungkapan yang tercantum dalam SR Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN tahun 2018-2020 sehingga dapat diperoleh gambaran perubahan luas pengungkapan dari tahun ke tahun. Analisis dilakukan dengan menggunakan GRI Standards yang efektif berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi anggota Himbara untuk meningkatkan luas pengungkapan kegiatan CSR yang dilakukan dalam SR masing-masing.



Gambar 1 Indeks Kualitas CSR Tahun 2018
Sumber : cnnindonesia.com (data diolah), 2018

KAJIAN PUSTAKA

Teori Legitimasi

Teori ini didasarkan pada adanya gagasan mengenai kontrak sosial yang timbul antara suatu organisasi dengan lingkungan tempat beroperasinya organisasi tersebut (Deegan & Unerman, 2011 dalam Janang et al., 2020). Pendapat lain menyatakan, teori ini berangkat dari pendapat bahwa pada hakikatnya suatu organisasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat luas (Ullah et al., 2019). Dalam pandangan Teori Legitimasi, keberadaan dan keberlangsungan organisasi bergantung pada kontrak sosial tersebut yang berimplikasi pada adanya pengakuan organisasi dari lingkungan sekitar (Solikhah et al., 2020). Sejalan dengan pandangan tersebut, Mathews (1997) dalam Deegan (2019) menyatakan bahwa suatu organisasi harus berusaha memperoleh hak untuk mengelola sumber daya yang ada di sekelilingnya dan hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh organisasi yang keberadaannya telah disetujui oleh masyarakat di sekitar organisasi tersebut berdiri. Kondisi ini sedikit banyak memaksa organisasi, baik perusahaan maupun entitas bisnis lainnya, untuk mengadopsi strategi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan yang kemudian dikenal sebagai CSR (Zyznarska-Dworczak, 2018). Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan salah satu usaha yang ditempuh perusahaan untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat dan lingkungan sekitar dengan beroperasi sesuai norma dan aturan yang berlaku.

Teori Stakeholder

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya perusahaan memerlukan setiap bentuk dukungan dari para pemangku kepentingan dalam melaksanakan operasinya (Zain, 2021). Teori ini memandang bahwa shareholder dan stakeholder memiliki kedudukan yang sama dalam hal ketertarikan terhadap semua keputusan yang diambil perusahaan. Dewasa ini CSR dipandang sebagai salah satu bentuk bergesernya perhatian perusahaan yang tidak hanya berfokus pada pemegang saham, namun juga pada para pemangku kepentingan baik karyawan, pemasok, pelanggan, masyarakat lokal bahkan media (Nikolova, 2017). Teori ini juga memandang bahwa CSR merupakan salah satu etika bisnis, dimana CSR dan Teori Stakeholder merupakan bagian satu sama lain (Freeman & Dmytriyev, 2017). Pelaporan CSR dianggap sebagai salah satu tanggung jawab sosial, meski para pemangku kepentingan memiliki pilihan untuk menggunakan atau tidak menggunakan laporan tersebut (Salsabila, 2021). Hal-hal tersebut di atas menunjukkan keterkaitan antara Teori Stakeholder dan pelaksanaan CSR perusahaan yang dianggap sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Pengembangan konsep CSR tidak terintegrasi satu sama lain sehingga tidak ada kesepakatan jelas mengenai definisi CSR itu sendiri (Dmytriyev et al., 2021). Dalam sektor perbankan, yang dimaksud CSR ialah pemahaman mengenai kemajemukan jasa keuangan, penegakan etika, strategi di bidang keuangan, manajemen risiko, adanya krisis internal maupun perlindungan terhadap hak-hak nasabah (Yeung, 2011 dalam Salsabila, 2021). Namun demikian ada pula pendapat yang menyatakan bahwa CSR adalah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mendistorsi aktivitas bisnis yang dipandang ‘salah’ oleh lingkungannya (Freeman & Dmytriyev, 2017). Para penganut paham ini berpendapat bahwa CSR tidak lebih dari sekedar menutupi kesalahan akibat

menganiaya salah satu pemangku kepentingan dengan melakukan banyak aktivitas bermanfaat pada pemangku kepentingan lainnya.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

SR dianggap sebagai cara perusahaan untuk menyampaikan berbagai aktivitas yang telah dilakukan dalam memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan (Ningsih & Cheisviyanny, 2019). Pengungkapan yang disampaikan dalam SR mengkomunikasikan kegiatan perusahaan dan dampaknya terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat, termasuk kebijakan perusahaan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan (Dalina, 2015). Pada dasarnya penerbitan SR merupakan salah satu kewajiban dan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mengelola dampak sosial di tempat mereka beroperasi untuk menjawab tuntutan masyarakat di era globalisasi (Janang et al., 2020). Di Indonesia, konten pengungkapan keberlanjutan masih bersifat voluntary disclosure karena belum adanya standar yang menjadi acuan. Hal ini menyebabkan perusahaan bebas memilih aktivitas CSR yang akan dilaporkan (Syahputra et al., 2019). Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya SR tidak hanya memuat informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan saja, melainkan juga informasi yang bersifat non keuangan seperti informasi mengenai berbagai kegiatan sosial dan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan di masa yang akan datang.

The Global Reporting Initiative (GRI)

Didirikan di Boston pada tahun 1997, GRI dapat dianggap sebagai pelopor penyusunan kerangka Laporan Keberlanjutan yang menjadi acuan perusahaan di seluruh dunia (Syahputra et al., 2019). GRI mulai menginisiasi panduan penyusunan SR pada tahun 2000. Pedoman ini terus mengalami perkembangan dengan nama dan kodifikasi yang lebih spesifik. Pada tahun 2002, GRI menerbitkan GRI G2 disusul GRI G3, GRI G3.1 dan GRI 4 berturut-turut pada tahun 2006, tahun 2011 dan tahun 2013. Tahun 2017, GRI meluncurkan GRI Standards yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2018 (Pusaka, 2017). GRI Standards menggambarkan best practice pelaporan dampak yang ditimbulkan oleh proses bisnis perusahaan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan sekaligus membantu perusahaan dalam melakukan identifikasi dan pelaporan informasi kegiatan sosialnya agar dapat dinilai dan dibandingkan (Salsabila, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yakni pengumpulan dan analisis data-data dan informasi secara mendalam untuk mengidentifikasi hal-hal yang tersirat dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2013 dalam Ningsih & Cheisviyanny, 2019). Jenis penelitian ini berfokus pada penelaahan secara komprehensif atas informasi yang tersedia pada literatur teori sesuai tema penelitian (Syahputra et al., 2019).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yakni data sekunder berupa Laporan Keberlanjutan yang dipublikasikan melalui situs masing-masing bank Himbara. Suatu data disebut data sekunder jika data yang diperoleh telah dilakukan pengolahan sebelumnya dan bersumber dari artikel, situs, publikasi maupun sumber-sumber lain (Arikunto, 2006).

Teknik Analisis Data

Teknis analisis yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*) dengan menggunakan kategori yang diajukan oleh Sembiring (2007) dimana setiap detail pengungkapan dalam SR akan diberikan skor 1 dan skor 0 jika tidak dilakukan pengungkapan (Tan et al., 2020; Widiatmoko, 2020). Selanjutnya total skor yang diperoleh akan dibandingkan dengan jumlah detail pengungkapan yang tercantum dalam *GRI Standards* untuk mengetahui skor pengungkapan CSR (Awuy et al., 2016; Dalina, 2015). Formulasi penghitungan skor dapat terlihat pada rumus di bawah ini:

$$\text{Skor Pengungkapan CSR} = \frac{\text{Total Skor Pengungkapan Perusahaan}}{\text{Jumlah Detail Pengungkapan GRI Standards}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan di atas, maka skor pengungkapan tertinggi pada tahun 2018 yang dapat diperoleh adalah sebesar 144 poin sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 148 poin. Perbedaan skor disebabkan oleh adanya penambahan aspek perpajakan dalam indikator ekonomi mulai tahun 2019. Adapun pengungkapan yang diukur adalah pengungkapan umum dan pengungkapan khusus yang terdiri dari pengungkapan atas pendekatan manajemen, aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sosial.

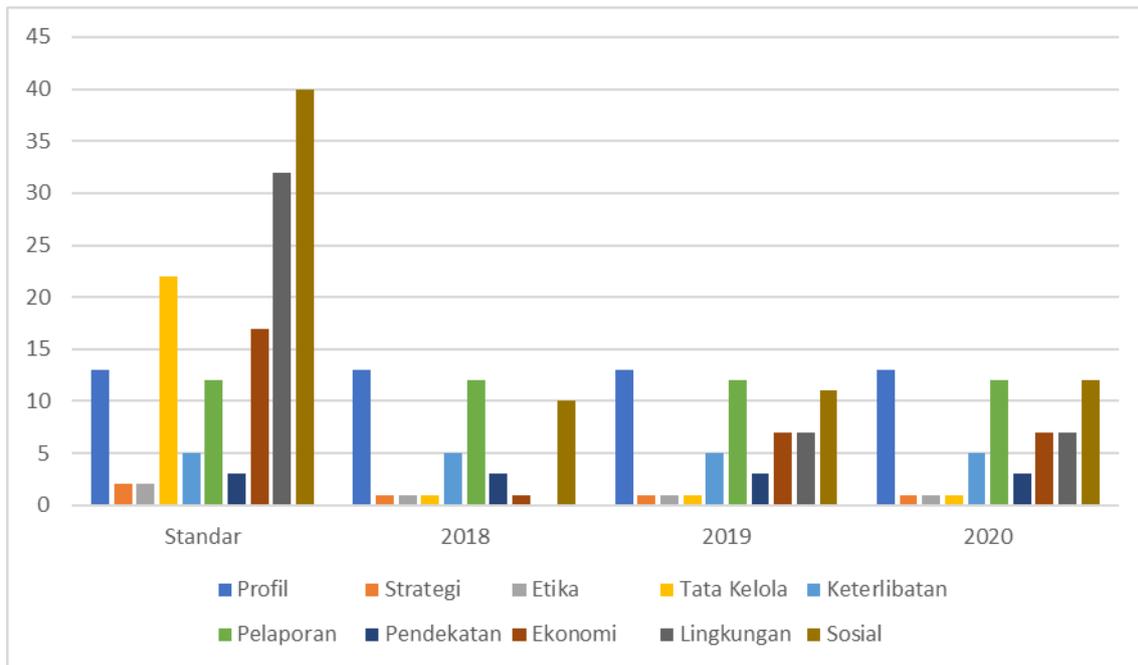
PEMBAHASAN

Bank Mandiri

Bank Mandiri telah melakukan pengungkapan yang cukup baik pada Pengungkapan Umum kecuali dalam hal pengungkapan kategori Tata Kelola. Pada tahun 2018, Bank Mandiri hanya melakukan pengungkapan mengenai struktur tata kelola pada Pengungkapan Umum Kategori Tata Kelola dari 22 indikator yang tercantum dalam *GRI Standards*. Banyaknya pengungkapan kategori ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Pada Pengungkapan Khusus kategori Ekonomi, terjadi peningkatan cukup signifikan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada kedua tahun tersebut, Bank Mandiri mencatat detail pengungkapan sebanyak 7 *item* atau sebesar 41,2% sedangkan pada tahun 2018 hanya mencatat 1 dari 17 *item* yang harus diungkapkan atau sebesar 7,7%. Meskipun pengungkapan pada kategori Lingkungan pada tahun 2019 dan tahun 2020 hanya berkisar pada angka 21,9% namun jika dibandingkan tahun 2018, terlihat peningkatan jumlah pengungkapan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, pengungkapan kategori Lingkungan tidak dilakukan sama sekali sedangkan pada tahun-tahun berikutnya dilakukan pengungkapan sebanyak 7 *item* dari total 32 detail pengungkapan yang harus dicantumkan. Dari sebanyak 40 detail pengungkapan pada kategori Sosial, Bank Mandiri hanya melakukan pengungkapan sebanyak 10 *item* (25%) pada tahun 2018, 11 *item* (27,5%) pada tahun 2019 dan 12 *item* (30%) pada tahun 2020.

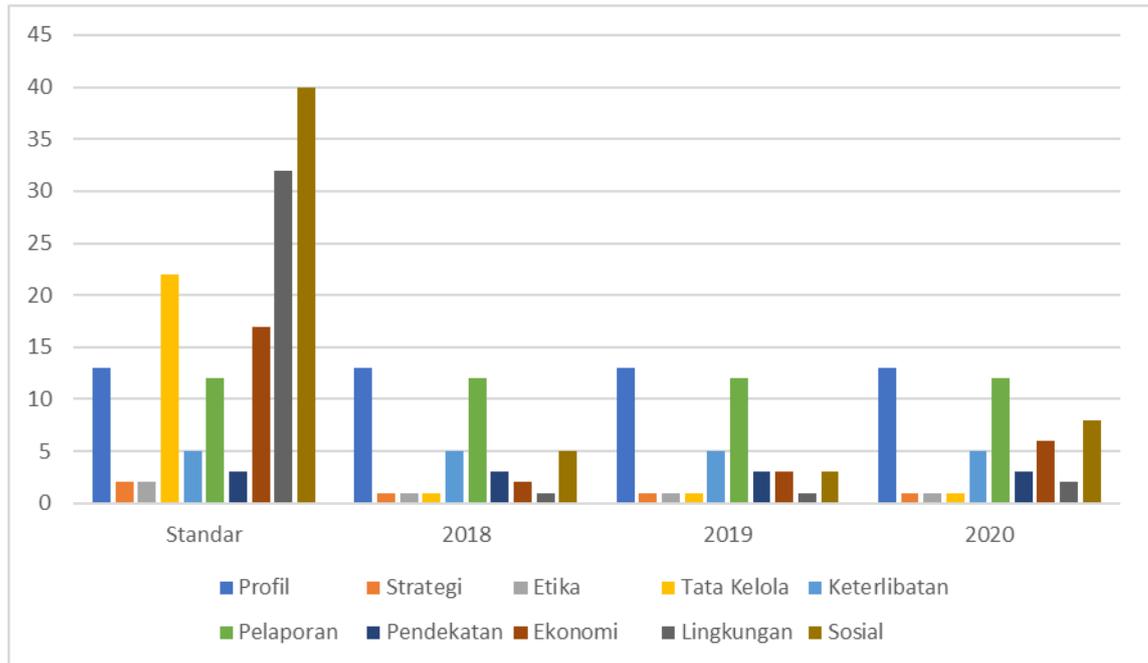
Secara keseluruhan, skor pengungkapan item *GRI Standards* SR Bank Mandiri dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, skor pengungkapan SR Bank Mandiri berada pada angka 32,6% dengan detail pengungkapan sebanyak 47 *item*. Pada tahun 2019, skor pengungkapan mengalami peningkatan pada angka 41,2% dengan detail pengungkapan sebanyak 61 *item*. Pada tahun 2020, detail pengungkapan pada SR Bank Mandiri berjumlah 62 *item* atau sebanyak 41,9%.



Gambar 2 Tingkat Pengungkapan *Sustainability Report* Bank Mandiri

BNI

Senada dengan Bank Mandiri, SR BNI 2018-2020 juga hanya mengungkapkan 1 *item* dari 22 detail pengungkapan pada Pengungkapan Umum kategori Tata Kelola. Pengungkapan tersebut merupakan pengungkapan mengenai struktur tata kelola. Sedangkan Pengungkapan Khusus kategori Ekonomi SR BNI 2018-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, dilakukan pengungkapan sebanyak 2 *item* atau 15,4% dari 13 detail pengungkapan. Terjadi penambahan pengungkapan pada tahun 2019 dimana dilakukan pengungkapan sebanyak 3 *item* atau sebesar 17,6% dari 17 detail pengungkapan. Pada tahun 2020, pengungkapan kategori ini berada di angka 35,3% dengan 6 *item* pengungkapan yang dilakukan BNI. Jumlah pengungkapan kategori Lingkungan pada SR BNI 2018-2020 secara berturut-turut berjumlah 1 *item*, 1 *item* dan 2 *item* dari total 32 detail pengungkapan yang seharusnya dilakukan. Pada kategori Sosial, SR BNI 2018 memuat 12,5% dengan 5 detail pengungkapan. Pada tahun 2019, terjadi penurunan jumlah pengungkapan menjadi 3 *item* atau sebesar 7,5% dan kembali meningkat pada tahun 2020 dengan 8 *item* atau sebesar 20% dari total 40 detail pengungkapan kategori Sosial. Berdasarkan data-data di atas, pengungkapan dalam SR BNI pada tahun 2018 hanya mencapai 30,6%, pada tahun 2019 sebesar 29,1% dan 35,1% pada tahun 2020.



Gambar 3 Tingkat Pengungkapan *Sustainability Report* BNI

BRI

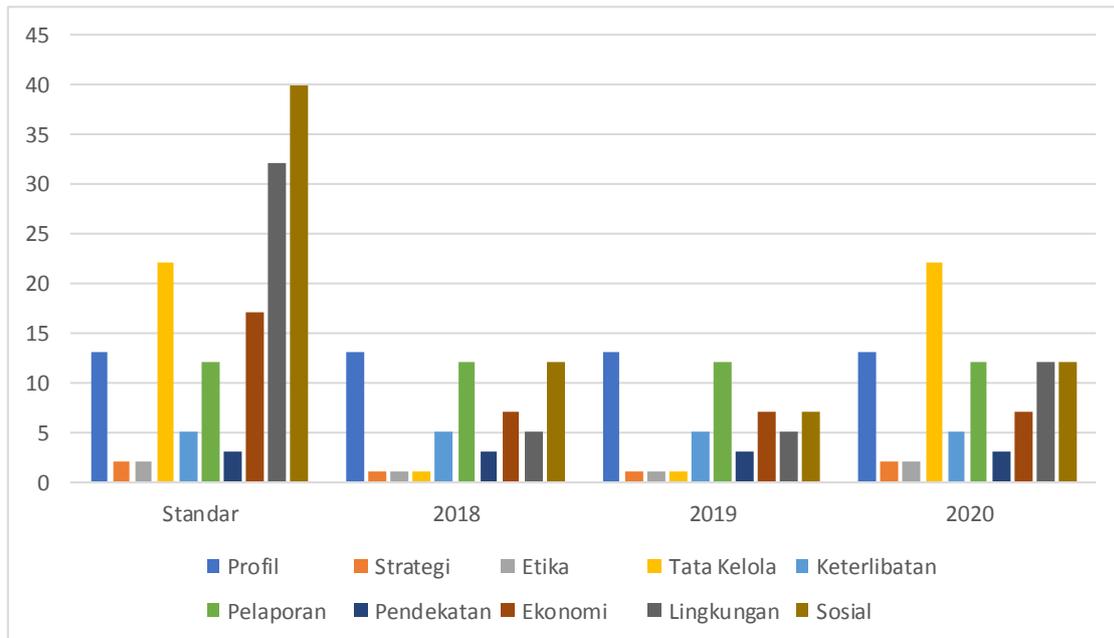
BRI memiliki skor pengungkapan yang lebih baik daripada kedua bank sebelumnya. Pada tahun 2018, tercatat skor pengungkapan dalam SR sebesar 41,7%, sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga berada pada angka 37,2% dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah pengungkapan yang sangat signifikan dengan skor pengungkapan sebesar 62,8%. Peningkatan ini diakibatkan oleh peningkatan detail pengungkapan pada SR BRI Tahun 2020 dimana Pengungkapan Umum kategori Tata Kelola diungkapkan secara lengkap sebanyak 22 detail pengungkapan sementara tahun 2018 dan tahun 2019 hanya dilakukan 1 item saja.

Dalam hal Pengungkapan Khusus, peningkatan terjadi di hampir seluruh kategori. Pada kategori Ekonomi, dilakukan pengungkapan sebanyak 10 *item* atau sebesar 58,8% di tahun 2020 sedangkan pada tahun 2018 dan tahun 2019 hanya dilakukan pengungkapan sebanyak 7 *item* atau sebesar 41,2%. Kategori Lingkungan juga mencatat peningkatan detail pengungkapan. Pada tahun 2018 dan tahun 2019, pengungkapan kategori ini hanya sebanyak 5 *item* dengan skor 15,6% sedangkan pada tahun 2020 dilakukan pengungkapan sebanyak 12 *item* dengan skor 37,5%. Pengungkapan kategori Sosial pada tahun 2018 berada pada angka 30% dengan 12 *item* pengungkapan. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya berjumlah 7 *item* atau sebesar 17,5%. Pada tahun 2020, detail pengungkapan pada SR BRI kembali di angka angka 30% dengan 12 *item* pengungkapan.

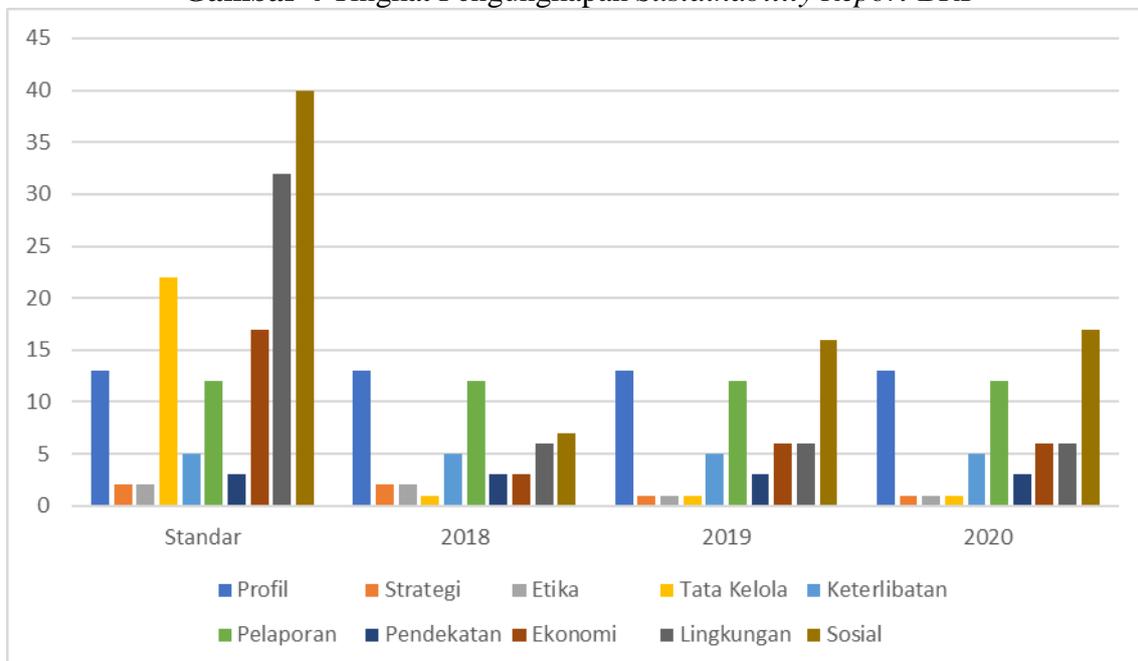
BTN

SR BTN menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan Bank Mandiri dan BNI dalam hal jumlah detail pengungkapan pada Pengungkapan Umum kategori Tata Kelola. SR BTN secara konsisten hanya mengungkapkan 1 *item* berupa struktur tata kelola dari total 22 detail pengungkapan pada kategori ini. Pada Pengungkapan Khusus kategori Ekonomi, SR BTN tahun 2018 menyajikan pengungkapan sebanyak 3 detail

pengungkapan dengan skor 23,1%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, pengungkapan yang dilakukan bertambah menjadi 6 *item* dengan skor sebesar 35,3%. Kategori Lingkungan pada SR BTN 2018-2020 cenderung tidak mengalami perubahan dengan jumlah pengungkapan sebanyak 3 *item* atau sebesar 18,8%. Kategori Sosial pada SR BTN terlihat cukup mengalami peningkatan dengan skor 17,5% pada tahun 2018, 43,2% pada tahun 2019 dan 42,5% pada tahun 2020. Secara keseluruhan, skor pengungkapan SR BTN pada tahun 2018 adalah sebesar 37,5%, pada tahun 2019 sebesar 43,2% dan pada tahun 2020 sebesar 43,9%.



Gambar 4 Tingkat Pengungkapan *Sustainability Report* BRI



Gambar 5 Tingkat Pengungkapan *Sustainability Report* BTN

KESIMPULAN

Rendahnya skor pengungkapan dalam SR keempat bank di atas sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dimana persentase pengungkapan kegiatan-kegiatan sosial berbagai perusahaan di Indonesia masih tergolong rendah (Dewi, 2013; Fauziah et al., 2016; Rindiyawati & Arifin, 2019; Suastha, 2016; Trisnawati, 2012). Hal ini dapat terlihat dari skor kategori tata kelola, ekonomi, lingkungan dan sosial yang rata-rata memiliki skor dibawah 50%. Keempat bank yang tergabung dalam Himbara ini terlihat memiliki kemiripan pola dalam *Sustainability Report* (SR) yang kuat dalam Pengungkapan Umum meliputi profil organisasi, strategi, etika dan integritas, keterlibatan pemangku kepentingan serta pratik pelaporan. Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN dirasa perlu menyajikan pengungkapan yang lebih detail dalam hal tata kelola, ekonomi, lingkungan dan sosial mengingat SR merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Ditambah dengan status bank Himbara sebagai BUMN, terdapat kewajiban yang lebih ‘mendesak’ untuk menyajikan berbagai pengungkapan kegiatan sosial sebagai bentuk pelaporan tanggung jawab mereka kepada masyarakat Indonesia yang diwakili oleh pemerintah selaku pemegang saham terbesar.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalina. (2015). Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(2), 14–27.
- Dewi, V. A. S. (2013). *Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Karakteristik Perusahaan*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Fauziah, G., Irwanto, A. K., & Syamsun, M. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan pada Indeks Saham LQ45. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 11(1), 52–60. <https://doi.org/10.29244/mikm.11.1.52-60>
- Lane, A. B., & Devin, B. (2017). Operationalizing Stakeholder Engagement in CSR: A Process Approach. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 25(3), 267–280. <https://doi.org/10.1002/csr.1460>
- Nájera-Sánchez, J. J. (2020). A Systematic Review of Sustainable Banking Through A Co-word Analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/su12010278>
- Ningsih, A. T., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility PT. Bukit Asam, Tbk Berdasarkan Global Reporting Initiatives (GRI) Dan Kaitannya Dengan PROPER. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 846–864. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.114>
- Pusaka, S. (2017). *Peluncuran GRI Standards 2018: Membaca Arah Akuntabilitas Masa Depan*. Majalahcsr.Id. <https://majalahcsr.id/peluncuran-gri-standards-2018-membaca-arrah-akuntabilitas-masa-depan/>
- Rindiyawati, A., & Arifin, J. (2019). Determinan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Industri Perbankan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i1.244>
- Salsabila, S. T. (2021). Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Di

- Perbankan Indonesia (Studi Komparatif Bank Pemerintah dan Bank Swasta). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 103–111.
- Sardanelli, D., Conte, F., Vollero, A., & Siano, A. (2021). CSR Signals: Exploring Their Use In Controversial Industries. *Italian Journal of Marketing*, 2021(3), 249–266. <https://doi.org/10.1007/s43039-021-00030-z>
- Suastha, R. D. (2016). *Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah*. [Www.Cnnindonesia.Com](http://www.cnnindonesia.com).
- Syahputra, D., Helmy, H., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengungkapan Lingkungan Berdasarkan Global Reporting Initiatives (GRI) G4. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 678–693. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.102>
- Trisnawati, R. (2012). Pengukuran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 16(2), 103–121.